

INFOBPJS

KESEHATAN

Apa itu program JKN ?

MUATAN

JAMINAN SOSIAL MASUK PELAJARAN DI SEKOLAH

**PROGRAM RUJUK BALIK
PERMUDAH AKSES LAYANAN
PENYAKIT KRONIS**

**YUK KENALI PEMANIS BUATAN
DAN DAMPAKNYA BAGI
KESEHATAN**

**KOLABORASI AI DAN
KREATIFITAS MANUSIA KUNCI
MASA DEPAN LEBIH BAIK**



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SAATNYA PEMOHON SKCK TERLINDUNGI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



Forwarded
Nama Peserta: FEXXX OKXXXXXXXXX
Jenis Peserta: PEGAWAI SWASTA
Status Peserta: AKTIF
2:34 pm

Mulai 1 Agustus 2024

DIBERLAKUKAN KEPESERTAAN JKN AKTIF BAGI PEMOHON SKCK



Pastikan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Anda Aktif

**TANDA BUKTI KEPESERTAAN JKN AKTIF
BERUPA HASIL SCREENSHOT PADA:**



Chat PANDAWA
nomor 0811 8 165 165



Aplikasi Mobile JKN diunduh
melalui Play Store atau App Store



[bpjskesehatan_ri](#)

[BPJS Kesehatan](#)

[BPJSKesehatanRI](#)

www.bpjs-kesehatan.go.id

MENGENALKAN

JAMINAN KESEHATAN PADA GENERASI MASA DEPAN LEWAT KURIKULUM PENDIDIKAN

Beberapa waktu lalu, puluhan murid Sekolah Menengah Atas (SMA) berbondong-bondong mengunjungi BPJS Kesehatan, tepatnya di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Antusias memenuhi tatapan mereka saat diajak berkeliling melihat langsung alur pelayanan yang dilalui peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat mengurus keperluannya di kantor cabang. Riuhan tanya jawab memenuhi ruangan ketika para siswa ini dibekali dengan pengetahuan seputar Program JKN, jenis-jenis kepesertaannya, manfaatnya, hingga mekanisme berobat yang benar.

Pemandangan tak biasa ini merupakan sebuah langkah baru yang digagas oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan memasukkan jaminan kesehatan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, diharapkan kesadaran memaknai pentingnya jaminan kesehatan bisa tertanam dalam diri seseorang sejak dini.

Ini adalah sebuah proyek jangka panjang yang muaranya bisa mengubah sikap, perilaku, maupun gaya hidup masyarakat di masa mendatang. Kami berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial. Jangan sampai ada orang yang sudah menjadi peserta JKN, tapi yang bersangkutan tidak tahu kalau sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif, bagaimana cara memanfaatkannya, apa saja hak dan kewajibannya.

Proyek kurikulum pendidikan ini diharapkan mampu membentuk generasi penerus bangsa yang melek jaminan sosial, sehingga mereka tergerak untuk turut mengajak

keluarga, teman, hingga masyarakat luas dalam mewujudkan ekosistem jaminan sosial yang berkualitas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Muatan kurikulum jaminan sosial sudah banyak diadopsi di negara-negara lain, seperti di Amerika Serikat dan Uruguay. Studi membuktikan bahwa peningkatan literasi seputar jaminan kesehatan berimbas pada pertumbuhan kepesertaan dan pemanfaatan jaminan kesehatan di sana.

Di Indonesia, pengenalan jaminan kesehatan ini juga diharapkan bisa membangkitkan nurani generasi muda untuk melestarikan tradisi bangsa kita yang diwariskan dari masa ke masa, yaitu budaya gotong royong. Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan adalah satu-satunya aksi gotong royong massal yang dilakukan seluruh penduduk Indonesia dari Sabang hingga Merauke untuk membantu sesama.

Tantangannya saat ini adalah mengemas materi pendidikan tersebut dengan cara penyampaian yang menarik, supaya membekas di benak para siswa. Terlebih generasi masa kini tumbuh dengan pemikiran kritis, sehingga penting bagi kita untuk mampu menjawab rasa penasaran mereka yang tinggi. Bicara soal cara penyampaian pesan, mayoritas generasi milenial tentu familier dengan media sosial.

Karena itu, BPJS Kesehatan juga memanfaatkan Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, hingga TikTok sebagai media informasi dan edukasi yang aksesibel. Kami juga melayani tanya jawab interaktif di kolom komentar atau melalui *direct message* untuk mengakomodir permintaan informasi hingga pengaduan masyarakat di media sosial.



Pada akhirnya, masa depan Indonesia ada di tangan para tunas muda penerus bangsa. Oleh karena itu, kita perlu melakukan edukasi berkelanjutan dan proses pendekatan penuh empati kepada masyarakat. Selain menggalakkan langkah-langkah edukasi, upaya menjangkau aspirasi, melaksanakan evaluasi, dan menyempurnakan layanan harus dijalankan secara simultan dan konsisten, supaya hasilnya bisa kita petik bersama di masa mendatang.

**Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti**

DAFTAR ISI

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 120

06

FOKUS

MUATAN JAMINAN SOSIAL MASUK PELAJARAN DI SEKOLAH TUMBUHKAN KESADARAN PROGRAM JKN SEJAK USIA DINI

10

BINCANG

MUATAN JAMSOS DI SEKOLAH HARUS LEBIH MENARIK

12

MANFAAT

PROGRAM RUJUK BALIK PERMUDAH AKSES LAYANAN PENYAKIT KRONIS

14

PROSEDUR

INTEGRASI LAYANAN CHIKA DAN PANDAWA APA SAJA KEUNGGLANNYA?

16

TESTIMONI

RAIH AKREDITASI SINTA 4 JURNAL JKN DINILAI BERKUALITAS

18

YUK SEHAT

YUK KENALI PEMANIS BUATAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN



PENGARAH Ali Ghufroon Mukti **PEMIMPIN UMUM** Irfan Humaidi **PEMIMPIN REDAKSI** Rizcky Anugerah **SEKRETARIAT** Raden Paramita Suciani, Retno Ristiana Haryatie **REDAKTUR** Afriyeni Roza, Asyraf Mursalina, Juliana Ramdhani, Muhammad Chandra Ikhdha Nurrohman, Nopi Hidayat, Rahma Anindita, Rena Octora Pasuria, Sisca Usman **EDITOR KONTEN** Al Hafiz, Diah Ismawardani, Nandana Dwitiya Swastha, Ranggi Larissa Izzati **EDITOR KREATIF** Achmad Hafiz, Arif Budiman, Amin Rahman Hardi, Darusman Tohir **DISTRIBUSI & PERCETAKAN** Agustina Marniawati, Elmira Dwi Berty, KGS Hamdani Yayah Nugroho **PENGEMBANGAN** Akhmad Tasyrifan, Siswanto

EDUKASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DIMULAI DARI SEKOLAH

Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan

Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pengelolaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan adalah bagaimana masyarakat memahami akan pentingnya kehadiran perlindungan kesehatan bagi diri dan keluarga. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, pemahaman mengenai jaminan sosial sejak dini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, memasukkan muatan jaminan sosial dalam kurikulum sekolah dapat memberikan berbagai manfaat signifikan, baik bagi siswa secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah berinisiatif mulai memasukkan muatan jaminan sosial dalam kurikulum sekolah. Melalui modul ini, diharapkan akan terbentuk generasi penerus yang lebih sadar akan pentingnya program jaminan sosial. Generasi yang paham akan jaminan sosial, maka mampu mengajak partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan ekosistem jaminan sosial yang berkualitas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam edisi ini, *Media Info BPJS Kesehatan* akan mengangkat seperti apa tantangan dalam implementasi dalam menyukseskan modul kurikulum jaminan sosial di sekolah-sekolah. Tentu, kolaborasi bersama dalam ekosistem JKN akan menjadikan modul ini sebagai langkah nyata dalam mendorong pemahaman yang lebih luas dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial di kalangan generasi masa depan Indonesia.

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi dan masukan membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.

Redaksi



KANTOR PUSAT BPJS KESEHATAN
Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
10510 - Indonesia



20 POTRET JKN

PELAYANAN BPJS KESEHATAN UNTUK PASIEN KUSTA

22 CEK FAKTA

BPJS KESEHATAN BERI KERINGANAN BAGI WNI DI LUAR NEGERI HINGGA PESERTA NON AKTIF

24 INSPIRASI

JOVIAL DA LOPEZ MENGINSPIRASI GENERASI MUDA LEWAT KONTEN KREATIF

26 TEKNO

FRISTA LEBIH MUDAH KENALI DAN VERIFIKASI PESERTA JKN

28 GAYA HIDUP

KOLABORASI AI DAN KREATIVITAS MANUSIA KUNCI MASA DEPAN LEBIH BAIK

30 KILAS 6 PERISTIWA

KETUA DEWAS BPJS KESEHATAN SEBUT PROGRAM PESIAR PENTING PASTIKAN KEBERLANGSUNGAN UHC KENDARI



MUATAN JAMINAN SOSIAL

MASUK PELAJARAN DI SEKOLAH

TUMBUHKAN KESADARAN PROGRAM JKN SEJAK USIA DINI



Tak kenal maka tak sayang. Ungkapan ini mungkin relevan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial (jamsos) khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apabila masyarakat tidak mengenal lebih dekat, tentu mereka kurang perhatian dan peduli dengan jaminan kesehatan (jamkes) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tersebut. Untuk menumbuhkan kepedulian terhadap JKN, maka kesadaran akan pentingnya program ini sudah harus dibangun sejak usia dini. Karena ternyata literasi asuransi di masyarakat Indonesia masih rendah, termasuk asuransi sosial yang dibentuk negara.

Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-

2027 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada tahun 2022 berada hanya pada level 2,27%. Sementara indeks literasi asuransi masyarakat Indonesia juga tercatat hanya 31,72%, lebih rendah dibandingkan literasi perbankan 49,93%. Tingkat inklusi asuransi bahkan lebih rendah lagi, hanya 16,63% jauh di bawah perbankan yang mencapai 74,03%.

Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi asuransi yang menjadi basis untuk bisa mendorong meningkatnya inklusi asuransi termasuk jamsos. Oleh karena itu, pemerintah memandang sangat perlu untuk mengenalkan jamsos sejak usia dini lewat kurikulum pendidikan. Untuk merealisasikan itu, pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah

meluncurkan muatan jamsos dalam kurikulum pendidikan melalui Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Kantor Kemenko PMK pada Desember 2023 lalu.

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal, menjelaskan bahwa peningkatan pemahaman melalui kampanye, sosialisasi, serta edukasi literasi pentingnya jamsos menjadi urgensi dan perlu dilakukan. Karena itu pihaknya berinisiatif untuk memasukkan Program JKN dalam proses pembelajaran di sekolah dengan meminta saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk para ahli pendidikan. Masuknya jamsos dalam kurikulum pendidikan bertujuan meningkatkan literasi di kalangan pelajar, dan menciptakan kesadaran yang lebih luas sejak dini tentang pentingnya

JKN. Karena diharapkan nantinya peserta didik ini tidak hanya memahami secara pribadi, tapi bisa menjadi agen untuk keluarga mereka. Diharapkan mereka bisa mengomunikasikan pentingnya Program JKN kepada orang tua, keluarga, teman bahkan masyarakat. Mereka tidak sekadar memahami bahwa Program JKN ini penting, tetapi bagaimana cara memanfaatkannya, apa saja prosedur hak dan kewajiban mereka sebagai peserta.

Jangka Panjang

Dampak jangka panjang yang diharapkan dari implementasi muatan jamsos ini adalah menjamin keberlanjutan Program JKN. Karena harapannya proyek ini bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi

diharapkan masyarakat sejak dini bisa mengenalinya dan mengatasi kerentanan tersebut. Karena kerentanan itu bisa mempengaruhi siklus kehidupannya nanti.

“Orang bisa jatuh miskin karena kesehatan. Orang bisa jatuh miskin begitu kehilangan pekerjaan. Jadi semua yang dijamin akan dipahami di buku modul jamsos ini,” kata Agus.

Sebagai informasi, Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila disingkat P5 Muatan Jamsos dalam kurikulum pendidikan ini bertemakan Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik “Jaminan Sosial untuk Masa Depan yang Lebih Cerah”. Modul ini disusun bersama oleh Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbudristek, BPJS Kesehatan dan BPJS



Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam *Launching Muatan Jaminan Sosial dalam Kurikulum Sekolah* bersama Komisi IX RI DPR RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kemdikbudristek dan BPJS Ketenagakerjaan, di Jakarta (11/12/2023)

jamsos khususnya lagi Program JKN. Harapannya literasi mengenai pentingnya jaminan ini dapat diketahui secara komprehensif dan menyeluruh.

“Tujuan utama kita bukan hanya memberikan jaminan saja tapi literasi bahwa Anda sudah mempunyai jaminan. Karena percuma kalau kita sudah berikan jaminan kesehatan, tapi masyarakat tidak mengetahui dan mengenalinya atau tidak tahu memanfaatkannya,” kata Afdal.

Menurut Afdal, pembelajaran kepada pelajar lebih efektif untuk meningkatkan literasi Program

juga menjadi sebuah sikap atau gaya hidup di masyarakat.

“Apabila sejak usia dini mereka merasa jamsos penting dan sudah menjadi bagian dari sudut pandangnya, maka secara otomatis mereka akan menerapkan sendiri dengan aktif dalam Program JKN,” kata Afdal.

Ketua DJSN, Agus Suprpto, mengatakan pentingnya literasi jamsos sejak dini dikarenakan kerentanan sosial selalu menghantui semua masyarakat Indonesia. Dengan pengetahuan yang diberikan sejak dini mengenai jamsos

Ketenagakerjaan bersama para ahli pendidikan. Modul ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Inpres 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jamsos 2023-2024.

Sebetulnya integrasi muatan jamsos dalam kurikulum bukanlah barang baru. Ini sudah diterapkan di sejumlah negara, di antaranya Amerika Serikat dan Uruguay. Di Uruguay, dalam kebijakan pendidikan





Ketua DJSN
Agus Suprpto

mereka dibuatkan materi khusus mengenai jamsos di semua jenjang pendidikan dimulai dari anak berusia 5 tahun atau PAUD. Sedangkan di Amerika Serikat, muatan jamsos digabungkan dengan pendidikan keuangan individu di 12 jenjang pendidikan.

Hasilnya, di Uruguay, telah meningkatkan kepesertaan

masyarakat dalam program jamsos yang diselenggarakan pemerintah hingga lebih dari 20% dan jumlah manfaat pensiun tumbuh 15% sampai dengan tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan jamsos dalam kurikulum pendidikan dapat meningkatkan kepesertaan. Di Amerika Serikat, program tersebut memberikan *life skill* terhadap para pelajar agar bisa menjadi peserta jamsos yang berwawasan. Di Indonesia sendiri program ini baru mulai diterapkan di 2024 dan akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari tahap uji coba di jenjang SMA. Sebagai pintu masuknya, SMA Negeri 61 Jakarta ditunjuk pemerintah sebagai proyek percontohan.

Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi DJSN, Muttaqien, mengatakan pada tahap awal implementasi muatan jamsos dilaksanakan pada fase E kelas X dan fase F kelas XI dan XII di tahun 2024. Tahap lebih lanjut dilaksanakan pada level yang lebih rendah, yaitu pada fase C untuk kelas V-VI dan Fase D kelas VII-IX di tahun 2025. Kemudian terakhir pada fase A kelas I-II dan fase B kelas III-IV di tahun 2026. Ditargetkan di tahun 2027 muatan jamsos sudah bisa diimplementasikan di seluruh sekolah. Selain di pendidikan dasar dan menengah, ke depan muatan jamsos juga akan dilakukan di perguruan tinggi.

“Setiap fase dimulai dengan *piloting project* untuk mengidentifikasi *feedback* dan efektivitas materi dan media pembelajarannya,” kata

Muttaqien.

Implementasi muatan jamsos ini dimulai dari pelatihan atau *training of trainer* (TOT) kepada para guru untuk pemahaman mereka, dan integrasi pembelajaran kepada pelajar. Para pendidik dan guru penggerak diharapkan dapat mempraktikkan modul ini kepada peserta didiknya agar dapat menjadi generasi penerus yang peduli terhadap jamsos.

“Ada TOT, jadi kesiapan guru untuk memberikan modul itu, kemudian juga ada *pilot* dulu di beberapa sekolah. Kami lihat responnya seperti apa, dan setelah mendapatkan masukan dari *pilot* yang dilakukan, penyempurnaan-penyempurnaan akan dilakukan,” kata Muttaqien.

Muatan jamsos menghabiskan total 132 jam pelajaran dalam satu tahun ajaran. Ada sembilan aktivitas proyek dalam modul ini, yaitu pengenalan, eksplorasi isu, hak dan kewajiban, jelajah perlindungan, mekanisme kepesertaan jamsos demi keamanan masa depan, transformasi jamsos, eksplorasi jamsos, membangun kesadaran jamsos melalui media fisik atau media digital serta *socialfest*.

Integrasi muatan jamsos dilakukan melalui pendekatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dimensi yang perlu sekali diperkuat dengan modul P5 ini adalah prinsip kegotongroyongan, salah satu asas Program JKN. Dengan literasi jamsos, asas kegotongroyongan ini akan menjadi kekuatan yang dapat mengokohkan pilar jamsos dalam mewujudkan *national welfare* yang





Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal bersama BPJS Watch pada Kegiatan Sosialisasi Modul Proyek Muatan Jaminan Sosial dalam Kurikulum Sekolah di Jakarta (11/12/2023)

dicita citakan.

Menyambut Baik

SMA Negeri 61 Jakarta yang ditunjuk pemerintah sebagai sekolah uji coba menyambut baik pelaksanaan program ini. Kepala Sekolah SMA Negeri 61 Jakarta, Sri Mulyanti, mengatakan aktivitas pembelajaran JKN-KIS maupun jamsos lainnya di sekolah merupakan hal positif. Memang sudah seharusnya jamsos dikenalkan lebih dini kepada anak didik agar nanti ke depannya ketika sudah bekerja bahkan berkeluarga mereka sudah tahu lebih detail langkah-langkah untuk menjadi peserta dan memanfaatkannya. Bahkan mereka bisa mengedukasi keluarga, teman sebaya dan masyarakat sekitarnya.

“Anak-anak mendapatkan materi pembelajaran yang tentunya ini bekal buat mereka untuk mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui pembelajaran P5 ini anak juga belajar berpikir kritis, gotong royong dan kreatif,” kata Sri.

Menurut Sri, materi muatan jamsos saat ini sudah baik, namun ia menyarankan ke depannya dikemas lebih menarik lagi, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mempelajarinya. Ia berharap implementasi muatan jamsos ini jauh lebih baik ke depannya, dan bisa terus bekerja sama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pengajar dan guru informatika SMA

Negeri 61 Jakarta, Abdul Latif, mengatakan, proses pembelajaran jamsos di sekolahnya dilakukan melalui berbagai aktivitas. Siswa diberikan pengetahuan mengenai apa itu jamsos, bagaimana cara menjadi peserta, apa saja hak dan kewajibannya, bagaimana cara memanfaatkan, bagaimana cara klaim, dan lain sebagainya. “Banyak aktivitas dilakukan, mulai dari membuat *role play* dari sisi pembelajarannya. Kemudian anak-anak juga diminta buat poster, buat iklan di media sosial tentang jamsos. Inilah yang dikembangkan dalam model pembelajaran tentang jamsos, sehingga kekinian di anak-anak jaman sekarang mengena,” kata Abdul.

Menurut Abdul, ketika muatan jamsos ini mulai diajarkan di sekolah awalnya siswa kesulitan menerima dan memahami. Karena selama ini mereka hanya mengikuti orang tuanya sebagai peserta Program JKN. Orang tuanya yang mendaftar sebagai peserta, membayar iuran dan mengantar mereka ke rumah sakit ketika sakit. Tetapi setelah beberapa kali diberikan pembelajaran oleh pengajar, para siswa kemudian mulai menerima dan memahami bahkan berinisiatif untuk mencari tahu lebih banyak informasi mengenai Program JKN dari berbagai platform media sosial.

“Mereka sangat menerima materi-

materi yang diberikan selama kegiatan pembelajaran, karena dari yang tadinya tidak tahu apa apa sekarang menjadi tahu. Selama ini mereka cuma tahu mereka itu peserta Program JKN, ya hanya sebatas itu,” kata Abdul.

Abdul sepakat apabila muatan jamsos ini menjadi program nasional, sehingga seluruh masyarakat terutama pelajar sebagai generasi muda akan datang lebih tahu tentang Program JKN dan jamsos lainnya. Ini bekal pengetahuan buat mereka ketika nantinya dewasa, bekerja, dan menjadi orang tua. Bahkan kalau pun di usia muda ini mereka membutuhkan layanan kesehatan dengan Program JKN, mereka bisa saja memanfaatkannya sendiri karena sudah memahami prosedurnya.

Selain pengajar, para pelajar juga antusias menerima pembelajaran jamsos di sekolahnya. Para pelajar mengatakan bahwa jamsos ini adalah hal baru bagi mereka. Awalnya mereka menganggap ini adalah pengetahuan untuk orang tua, dan tidak penting bagi mereka. Tetapi dengan berbagai aktivitas dan materi yang diberikan oleh pengajar, kini lebih mudah mencerna dan wawasan mereka terbuka. Pemahaman mereka tentang Program JKN juga lebih menyeluruh. Bahkan dari pengajaran tersebut mereka juga mengetahui tentang pesatnya pemanfaatan digitalisasi dalam pelaksanaan Program JKN.



MUATAN JAMSOS

DI SEKOLAH HARUS DIKEMAS LEBIH MENARIK

Prof. Komaruddin, Rektor Universitas Negeri Jakarta



Jaminan sosial (Jamsos), termasuk di dalamnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masuk dalam pembelajaran di sekolah. Pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah meluncurkan Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai modul pembelajaran jamsos dalam kurikulum pendidikan di Kantor Kemenko PMK pada Desember 2023 lalu.

Modul ini disusun Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbudristek, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bersama para ahli pendidikan. Salah satu ahli pendidikan yang terlibat aktif dan memberikan sumbangsih dalam penyusunan modul tersebut adalah Prof. Komaruddin, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Pandangan beliau mengenai penyusunan modul tersebut selengkapnya disajikan dalam rubrik BINCANG Media Info BPJS Kesehatan edisi ini.

Bagaimana proses penyusunan modul jamsos ini dimulai ?

Prosesnya dimulai dengan dikumpulkan pemikiran-pemikiran dari berbagai ahli dan berbagai pihak untuk mengonstruksi konten apa, materi apa, atau muatan apa yang penting. Dari hasil kumpulan itu dibentuklah silabus, yang nantinya

mau dimasukkan di materi atau mata pelajaran apa. Sebetulnya bisa masuk di mata pelajaran lain, tapi kebetulan waktu itu kami diskusinya masuk di PPKn. Ketika silabus itu sudah jadi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat konten konten. Karena salah satu dalam kurikulum itu ada tujuan, materi, metode, dan ada penelitian maka yang penting juga adalah bagaimana materi atau kontennya menarik bagi siswa.

Apa tantangan terbesar saat menyusun modul ini ?

Tantangannya itu bagaimana mengonstruksi materi atau konten yang pas untuk bisa ditransformasikan kepada pelajar. Karena begini, untuk mendapatkan banyak ilmu dengan kuliah itu mudah, tapi ketika ilmu itu mau ditransformasikan kepada siswa itu tidak mudah. Jadi untuk para guru

walaupun bukan bidang keahliannya khusus jamsos, tetapi sepanjang dia memiliki pengetahuan tentang itu maka dia bisa mengonstruksi dan mentransformasikannya kepada siswa. Karena guru itu kuncinya adalah mengemas sebuah materi menjadi bahan yang menarik untuk bisa ditransformasikan. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi yang paling utama adalah menjadi nilai lalu menjadi perilaku. Begitu pun tentang jamsos ini, tidak sekadar transfer pengetahuan, siswa tidak hanya tahu apa itu jamsos tapi menjadi sebuah perilaku.

Dalam implementasi modul ini di sekolah apakah ada tantangan ?

Di sekolah tantangan utama adalah kemampuan literasi pimpinan sekolah itu sendiri. Kalau pimpinan dan guru punya literasi tentang jamsos maka dia terbuka dengan muatan ini. Dia akan mendukung menyuksekannya. Tapi kalau dia minim literasi, tertutup, kurang komitmen apalagi tidak punya kesadaran kebangsaan bahwa masa depan bangsa itu ditentukan oleh anak muda sekarang maka dia sulit untuk mendukung. Akan tetapi kita yakin modul P5 muatan jamsos akan dilaksanakan dengan baik di sekolah karena ini sudah menjadi sebuah program, dan nantinya akan ada evaluasi.

Evaluasinya akan dilihat apakah mencapai tujuan atau tidak. Karena kita harapkan siswa ini juga menjadi agen perubahan bukan hanya di keluarga tapi juga masyarakat. Tantangan lainnya terkait pengemasan muatan tadi. Perlu dicarikan sekolah percontohan yang terbaik. Jadi mungkin *pilot project* ini tidak saja di satu sekolah, tetapi beberapa sekolah. Setelah dievaluasi nanti ke depan bisa menjadikannya kebijakan nasional bekerja sama dengan pusat kurikulum.

Sejauh ini bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan di sekolah ?

Mencermati respon dari guru-guru, jelas ada pengaruh atau dampak dari implementasi modul ini. Tetapi sebagai bagian dari *assessment* kita harus evaluasi lebih dalam, tidak hanya sebatas pengakuan atau klaim oleh pihak sekolah. Misalnya soal metodologi, pembahasan jamsos ke orang tua kan berbeda dengan anak-anak terutama dari cara menangkap apa yang kita sampaikan. Maka ke depan mungkin kita perlu memperhatikan apakah cara kita menyampaikan itu sesuai dengan apa yang siswa SMA sekarang itu suka. Sehingga mereka dapat ilmunya, tapi juga hal menyenangkannya. Sekarang ini kecenderungan anak anak milenial

memahami sesuatu pengetahuan melalui visual, dan proses interaktif itu lebih senang.

Adakah pesan Prof kepada guru, siswa, dan orang tua tentang pentingnya memahami dan mengaplikasikan muatan jamsos khususnya jamkes sejak usia dini ?

Muatan jamsos khususnya jaminan kesehatan (jamkes) penting sekali masuk kurikulum karena kita tahu bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah hal paling utama untuk kemajuan bangsa apalagi untuk capai Indonesia Emas. Salah satu faktor pembentukan keunggulan SDM adalah bidang kesehatan. Oleh karena itu persoalan kesehatan ini menjadi sesuatu yang penting, dan juga harus disadari kaum muda sejak dini terutama pelajar.

Pelajar harus paham sehingga nanti ketika dewasa dan kerja sudah harus memiliki kesadaran pentingnya memiliki jamkes. Saya juga berharap guru memiliki kesadaran tentang pentingnya jamkes, dan bagaimana memanfaatkannya. Setelah ada kesadaran itu dia bisa mendiseminasikannya kepada yang lain.



Kegiatan Podcast BPJS Kesehatan bersama Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal dan Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Komarudin dalam sosialisasi Muatan Jaminan Sosial dalam Kurikulum Sekolah.



PROGRAM RUJUK BALIK

PERMUDAH AKSES LAYANAN

PENYAKIT KRONIS



Seiring dengan berkembangnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, kebutuhan untuk mengatur alur rujukan pasien menjadi semakin penting, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang.

Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan sejak awal telah menggulirkan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan kontinuitas perawatan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemudahan akses pelayanan pengobatan bagi peserta JKN dengan penyakit kronis dan kondisi stabil.

Dengan mengelola pasien penyakit kronis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), beban Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit dapat dikurangi. Selain itu, program ini dapat memberikan perawatan berkelanjutan yang lebih dekat dengan tempat tinggal pasien, sehingga harapannya dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.

Adanya pengelolaan penyakit kronis yang lebih baik juga bisa memastikan pasien dengan kondisi kronis mendapatkan perawatan yang konsisten dan terkoordinasi, mengurangi risiko terjadinya komplikasi, serta meningkatkan *awareness* peserta terkait pengobatannya.

Alur Pelayanan PRB

Implementasi Program Rujuk Balik melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang berkelanjutan dan terkoordinasi antara FKTP dan FKRTL.



Rencana ini mencakup jenis obat yang akan diberikan, jadwal kontrol, edukasi kesehatan, dan tindakan preventif lainnya. Pasien PRB akan menjalani pengobatan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh FKTP.

FKTP secara berkala memantau kondisi pasien dan mencatat perkembangan kesehatan pasien dalam catatan medis. Apabila terdapat perubahan kondisi atau komplikasi, FKTP akan berkomunikasi dengan dokter spesialis untuk mendapatkan saran lebih lanjut. Selain itu, peserta JKN tetap dapat dirujuk ke FKRTL untuk pemantauan 3 bulan sekali, atau apabila kondisi pasien memburuk dan memerlukan penanganan lebih lanjut yang tidak dapat ditangani di FKTP.

Cakupan Obat

Obat dalam Program Rujuk Balik merupakan obat yang direkomendasikan oleh dokter spesialis/sub spesialis dengan ketentuan inisiasi, restriksi, dan persepsan maksimal mengacu jenis obat PRB pada Formularium Nasional. Obat PRB dapat terdiri dari obat utama dan obat tambahan. Obat utama untuk indikasi yang sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan dalam Program Rujuk balik. Sedangkan obat tambahan dapat diberikan bersama obat utama untuk mengatasi penyakit penyerta atau mengurangi efek samping akibat obat utama. Obat utama dan obat tambahan tersebut harus masuk daftar obat PRB.

Pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang, seperti diabetes melitus, epilepsi, hipertensi, gangguan kesehatan jiwa kronik, penyakit jantung, sindroma lupus eritematosus (SLE), asma, *stroke*, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

Dalam pelayanan Program Rujuk Balik, pasien dengan penyakit kronis yang stabil diidentifikasi oleh dokter spesialis di rumah sakit. Dokter spesialis kemudian memberikan rujukan balik kepada pasien untuk melanjutkan perawatan di FKTP, seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Dokter spesialis juga membuat ringkasan medis dan rencana pengobatan untuk pasien yang akan dilanjutkan di FKTP.

Selanjutnya, pasien mendatangi FKTP dengan membawa dokumen rujukan balik dan ringkasan medis dari dokter spesialis. Dokter di FKTP nantinya akan menyusun rencana pengobatan berkelanjutan berdasarkan ringkasan medis dan rekomendasi dari dokter spesialis.



INTEGRASI LAYANAN CHIKA DAN PANDAWA APA SAJA KEUNGUNGULANNYA?



BPJS Kesehatan sebagai pengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mengintegrasikan kanal layanan Chat Assistant JKN (CHIKA) dengan kanal layanan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) menggunakan satu nomor WhatsApp, yaitu 0811 8 165 165.

PANDAWA sendiri adalah layanan administrasi yang memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai urusan administrasi terkait JKN. Layanan ini memungkinkan peserta untuk mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.

Sedangkan CHIKA adalah layanan asisten virtual berbasis chat yang dapat diakses melalui WhatsApp, Facebook Messenger, dan Telegram. Chika memberikan informasi dan bantuan terkait berbagai hal seputar JKN secara cepat dan interaktif.

Lahirnya layanan ini didorong oleh berbagai faktor yang mencakup kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi layanan, aksesibilitas, serta adaptasi terhadap kondisi dan perkembangan teknologi.

Banyak peserta JKN yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, sehingga sulit untuk mengunjungi kantor BPJS Kesehatan. Dengan adanya

layanan PANDAWA dan CHIKA, peserta dapat mengakses layanan administrasi dari mana saja dan kapan saja.

Kantor BPJS Kesehatan sebelumnya juga sering kali mengalami antrean panjang dan penumpukan jumlah peserta yang membutuhkan layanan administrasi. PANDAWA dan CHIKA membantu mengurangi jumlah peserta yang datang langsung ke kantor, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam sektor pelayanan publik memberikan peluang bagi BPJS Kesehatan untuk



mengembangkan layanan berbasis digital. PANDAWA dan CHIKA memanfaatkan teknologi komunikasi yang sudah ada untuk menyediakan layanan yang lebih modern, cepat, dan responsif.

Sebelumnya, layanan informasi diakses melalui CHIKA, dan perubahan data peserta JKN bisa diakses melalui PANDAWA. Kini, BPJS Kesehatan menyediakan *one stop service* untuk layanan non tatap

muka baik administrasi, informasi, maupun pengaduan melalui nomor WhatsApp 0811 8 165 165. Layanan ini juga bisa diakses peserta selama 24 jam.

JENIS JENIS LAYANAN PANDAWA	
1	Layanan administrasi, meliputi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, perubahan atau perbaikan data, ubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama TNI/POLRI dan pindah domisili kurang dari 3 bulan, pengurangan anggota keluarga, perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama, dan pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar.
2	Layanan informasi, meliputi cek status kepesertaan, cek status pembayaran, cek <i>virtual account</i> , skrining kesehatan, Info JKN, panduan layanan serta mencari lokasi kantor cabang BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan.
3	Layanan Pengaduan

CARA MENGAKSES PANDAWA	
1	Untuk mengakses layanan PANDAWA, Anda dapat mengirim pesan melalui WhatsApp di nomor 0811 8 165 165. Contoh: Hai, Halo. PANDAWA akan membalas pesan Anda dan memberikan pilihan menu utama. Anda dapat memilih menu yang dibutuhkan (Administrasi, Informasi, Pengaduan).
2	PANDAWA akan membalas pesan sesuai menu yang dibutuhkan. Anda dapat mengisi format ataupun link yang dikirim oleh PANDAWA untuk mendapatkan layanan administrasi, informasi, atau pengaduan.
3	Apabila sudah selesai, Anda dapat memberikan rating dan juga saran atas layanan PANDAWA.



RAIH

AKREDITASI SINTA 4

JURNAL JKN DINILAI BERKUALITAS



Diluncurkan tahun 2021 lalu, Jurnal JKN kini telah mengalami pengembangan dan peningkatan kualitas. Sejak diluncurkan telah menghasilkan 54 artikel jurnal. Sebagai kado di HUT ke-56 BPJS Kesehatan yang diperingati 15 Juli 2024, Jurnal JKN mendapat akreditasi *Science and Technology Index (SINTA) 4* dari Kemendikbud. Akreditasi ini bermakna jurnal milik BPJS Kesehatan tersebut telah melalui proses evaluasi dan memenuhi standar tertentu serta telah diakui sebagai jurnal ilmiah yang efektif dan berkualitas.

Raihan akreditasi SINTA 4 tersebut tak lepas dari partisipasi dan kontribusi para penulis Jurnal JKN. Mereka berkontribusi dalam upaya meningkatkan literasi dan

penelitian untuk Program JKN. Karya mereka memberikan dampak besar terhadap identifikasi masalah-masalah dalam pelaksanaan Program JKN, menemukan solusi inovatif, dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Salah satu penulis adalah Hanif Nur Rofiq. Hanif berharap karya ilmiah yang dihasilkannya bisa memberikan dampak pada perbaikan kualitas dan keberlanjutan Program JKN. Salah satu informasi dan perspektif dari tulisan-tulisan terdahulu, yaitu mengenai potensi *fraud* dan inefisiensi klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan (faskes) kepada BPJS Kesehatan, terutama variabel yang memiliki pengaruh signifikan

dalam menentukan inefisiensi dengan *machine learning*.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi saat ini adalah mengidentifikasi upaya yang bisa dilakukan untuk dapat memprediksi terjadinya pemborosan atau inefisiensi pada klaim yang diajukan oleh faskes ke BPJS Kesehatan.

“Tulisan ini bertujuan untuk mendeteksi dan memprediksi potensi inefisiensi atau klaim yang tidak sah dengan cepat dan akurat dengan menggunakan *machine learning*, sehingga meningkatkan waktu penyelesaian klaim,” kata Hanif.

Manfaat tulisan ini memberikan pencerahan bahwa metode verifikasi klaim yang dilakukan secara manual

memakan waktu. Penerapan *machine learning* dapat menangani volume data yang besar dengan cepat, mengurangi beban kerja pada verifikasi manusia, yang berujung pada percepatan waktu pemrosesan klaim. Selain itu, dengan mendeteksi dan mencegah klaim yang tidak efisien atau tidak sah, penelitian ini membantu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, membuat alokasi sumber daya lebih baik dan berpotensi menurunkan biaya bagi BPJS Kesehatan dan pesertanya.

Penulis lain, Andika Nurwin Maulana, memutuskan berpartisipasi dalam Jurnal JKN karena ingin karyanya membawa *multiplier effect* bagi masyarakat peserta Program JKN. Magister Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan, Program JKN adalah program pemerintah sehingga pemahaman masyarakat mengenai itu haruslah lebih luas. Karenanya dibutuhkan tulisan-tulisan yang mendukung pemahaman tersebut. Karya ilmiah para penulis sebagai fondasi pencerahan bagi masyarakat, misalnya tentang dasar penentuan tarif iuran oleh Pemerintah atau bagaimana pendanaan jaminan sosial kesehatan yang lebih kuat sehingga tidak defisit.

“Ketika kami mengkritisi Program JKN yang mengalami defisit, maka kami juga harus memberikan solusi bagaimana mencari sumber pendanaan lain. Jadi tidak menyalahkan *doang*, tetapi kita berusaha mencari solusinya seperti apa,” kata Andika.



Penulis

Andika Nurwin Maulana

Menurut dia, masyarakat harus tahu lebih spesifik mengapa tarif iuran ditentukan pemerintah sebesar itu. Untuk pekerja formal tarif iuran sebesar 5%, di mana 4% ditanggung pemberi kerja, dan 1% oleh pekerja, dan pekerja informal ditetapkan tarif kelas 1, 2 dan 3. Ketika literasi minim maka peserta akan merasa berat dengan tarif ini, lalu ada keengganan untuk ikut berpartisipasi. Mereka mungkin terdaftar sebagai peserta tapi tidak aktif membayar iuran.

“Ketika literasi minim mereka pasti merasa berat karena tidak sesuai

layanan yang diberikan. Apalagi mereka tidak ada kebutuhan kesehatan yang rutin, misalnya jarang ke rumah sakit. Tapi bagi yang cuci darah 2 kali seminggu ya mereka merasa manfaat lebih besar dari kewajiban,” kata Andika.

Tulisan lainnya adalah soal sumber pendanaan Program JKN sehingga tidak defisit. Ia menyebut ada mobilisasi sumber daya untuk memperkuat pendanaan Program JKN, yaitu dari masyarakat berpenghasilan tinggi. Pemerintah membatasi sumber itu dengan menetapkan tarif iuran pekerja formal 5% dari batas pendapatan Rp12 juta per bulan. Jadi pekerja yang gajinya di atas itu tetap hanya mengiur 5% dari Rp12 juta yaitu Rp600.000 per bulan. Padahal kalau misalnya gajinya Rp24 juta, ia bisa mengiur Rp1,2 juta per bulan.

“Makanya itu disebut dengan pembayaran yang bersifat regresif. Artinya orang semakin punya penghasilan di atas Rp12 juta akan mempunyai proporsi persentase kontribusi iuran yang dia berikan. Harusnya 5% dari penghasilan,” kata Andika.

Apalagi, menurut Andika, biaya kesehatan adalah pengeluaran primer maka 5% dari penghasilan di atas Rp12 juta pun sebenarnya masih ada orang yang mampu. Ini sejalan dengan prinsip gotong royong dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mampu membantu yang kurang mampu dan sehat membantu yang sakit.



YUK!

KENALI PEMANIS BUATAN DAN DAMPAKNYA BAGI KESEHATAN



Gula merupakan salah satu komoditas yang telah terdokumentasikan di dunia sejak ribuan tahun silam. Rasa manis memicu pelepasan hormon dopamin yang menghasilkan rasa senang dan bahagia, sehingga membuat konsumennya adiksi.

Di Indonesia, minuman berpemanis buatan semakin populer sebagai alternatif yang dianggap lebih sehat daripada minuman manis konvensional berbahan baku alami tanaman tebu.

Pada dasarnya, pemanis buatan relatif aman selama asupannya tidak melebihi batas harian. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, pemanis buatan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi tubuh, mulai dari obesitas hingga penyakit kardiovaskular.

Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menerbitkan Surat Edaran bernomor HK. 04.01.42.421.12.17.1666 tentang Batas Maksimum Penggunaan Pemanis Buatan yang Diizinkan

dalam Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

Pertama, aspartam yang biasa digunakan sebagai pemanis dalam permen karet, sereal sarapan, agar-agar, dan minuman berkarbonasi. Kandungan aspartam terdiri atas asam amino, asam aspartat, fenilalanin, dan sedikit etanol yang 220 kali lebih manis daripada gula konvensional.

Selanjutnya, ada juga sakarin dengan tingkat kemanisan mencapai 300-400 kali lebih kuat daripada gula konvensional, sehingga pemakaiannya dalam sekali penyajian untuk makanan olahan tidak boleh melebihi 30 mg. Sedangkan untuk minuman, tidak boleh lebih dari 4 mg/10 ml cairan.

Berikutnya, jenis sukralosa yang dihasilkan dari sukrosa dengan rasa manis 600 kali lebih kuat dibandingkan gula. Bahan ini biasa digunakan pada produk makanan yang dipanggang atau digoreng. Konsumsi harian sukralosa yang ideal adalah sebanyak 5 mg/kg berat badan.

Jenis pemanis lainnya bernama acesulfame potassium. Bahan ini sangat stabil dalam temperatur tinggi dan mudah larut, sehingga sering dipakai dalam banyak produk makanan. Batasan konsumsi harian yang disarankan untuk acesulfame potassium adalah 15 mg/kg berat badan.

Terakhir, adalah neotam yang banyak digunakan pada makanan rendah kalori. Secara kimia, kandungannya hampir sama seperti aspartam, tetapi rasanya 40 kali lebih manis dari aspartam. Dibandingkan dengan gula rafinasi, tingkat kemanisan neotam mencapai 8.000 kali lebih tinggi. Neotam dapat dikonsumsi hingga 18mg/kg berat badan dalam sehari.

Dampak buruk

Meskipun sering dipromosikan sebagai pilihan yang aman untuk menghindari kalori tambahan, namun penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebih pada pemanis buatan dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan.

Misalnya pemanis buatan seperti aspartam, yang kerap ditemui pada minuman bersoda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC) mengidentifikasi kemungkinan hubungan antara aspartam dan sejenis kanker hati yang disebut karsinoma hepatoseluler.

Hal itu diidentifikasi berdasarkan hasil tinjauan tiga penelitian minuman yang dimaniskan secara artifisial yang dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa.

Penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dengan cara yang tidak sepenuhnya dipahami konsumen. Pemanis ini dapat memicu perubahan dalam mikrobiota usus, yang berpotensi mengganggu keseimbangan gula darah dan sensitivitas insulin.

Ini berarti, meskipun tidak mengandung gula, minuman berpemanis buatan dapat berkontribusi pada resistensi insulin, kondisi yang menjadi salah satu penyebab utama diabetes tipe 2.

Di Indonesia, prevalensi diabetes meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 2018 menyebutkan sebanyak 61,27 % masyarakat Indonesia berusia 3 tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari.

Bahkan, Data Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkap konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia naik 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir (1996-2014).

Faktor-faktor seperti pola makan yang buruk, gaya hidup, dan konsumsi tinggi makanan serta minuman manis berperan besar dalam tren ini. Minuman berpemanis buatan mungkin terlihat sebagai solusi sehat, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan dapat memperburuk situasi.

Penting bagi masyarakat untuk menyadari potensi risiko yang terkait dengan konsumsi minuman berpemanis buatan. Para ahli kesehatan merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola gula darah dan kesehatan secara umum.

BPJS Kesehatan menyambut baik perihal rencana pemberian label warna (*color guide*) kandungan gula pada kemasan minuman berpemanis sebagai bentuk mitigasi gangguan kesehatan konsumen.

Hal ini diharapkan mampu menekan lonjakan kasus diabetes mellitus yang akan berdampak pada peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugerah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi gula yang berlebihan dan dampaknya terhadap kesehatan. "Edukasi melalui label warna dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi minuman dalam kemasan," ujarnya.

Kebijakan ini nantinya akan berdampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam menekan angka kasus diabetes mellitus baru di Indonesia. Menurutnya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat diharapkan akan terjadi penurunan konsumsi gula berlebih sehingga dapat mengurangi risiko terkena diabetes mellitus.

Selain itu, edukasi juga menjadi hal penting agar masyarakat mengutamakan pola makan seimbang yang kaya serat, protein, dan lemak sehat, serta rutin berolahraga, lebih disarankan daripada bergantung pada pemanis buatan.

Dengan meningkatnya pemahaman tentang bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh minuman berpemanis buatan, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil untuk melindungi kesehatan dan mencegah diabetes.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih makanan dan minuman yang benar-benar mendukung kesehatan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan ini.

Pengobatan

Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan terdapat 10,32 juta kasus rawat inap untuk penyakit diabetes mellitus

sepanjang tahun 2023. BPJS Kesehatan menggelontorkan biaya hingga Rp10,17 triliun untuk menjamin peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebagai bentuk dukungan dalam mengendalikan peningkatan kasus diabetes mellitus, BPJS Kesehatan juga menjamin pelayanan preventif skrining kesehatan berupa pemeriksaan gula darah bagi peserta yang memiliki risiko penyakit diabetes mellitus. Untuk mendapatkan pelayanan skrining kesehatan, peserta JKN wajib mengisi skrining riwayat kesehatan terlebih dahulu berupa pengisian mandiri kondisi riwayat penyakit dan juga gaya hidup peserta.

Bagi peserta yang telah terdiagnosa diabetes mellitus, maka peserta dapat diberikan pengobatan sesuai indikasi medis dengan ketentuan berlaku melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar dan juga dapat di rujuk ke rumah sakit (RS) sesuai indikasi medis.

BPJS Kesehatan menjamin pelayanan pemeriksaan, konsultasi, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), maupun rawat inap baik di FKTP maupun RS jika dibutuhkan sesuai indikasi medis yang diperlukan.

Bagi pasien diabetes mellitus yang telah dalam kondisi gula darah stabil di rumah sakit, peserta dapat mengikuti Program Rujuk Balik, sehingga peserta bisa tetap mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan obat diabetes mellitus secara rutin setiap bulan dari FKTP dan Apotek PRB tanpa harus ke rumah sakit.

"Ini merupakan langkah konkret BPJS Kesehatan untuk menjadikan Indonesia semakin sehat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat," katanya.



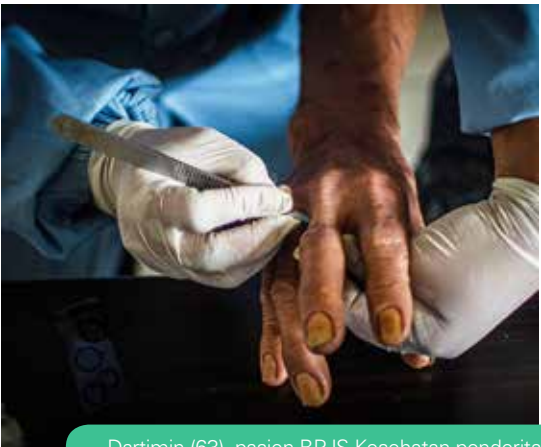
PELAYANAN

BPJS KESEHATAN UNTUK PASIEN KUSTA

Oleh : Abriansyah Liberto - Tribun Sumsel



Dartimin (63), penderita penyakit kusta (Lepra) menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rutin di RSUP Dr.Rivai Abdullah, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (25/7/2023). BPJS Kesehatan untuk pasien Program JKN yang rutin menjalani pemeriksaan seperti penyakit Kusta, Jika memiliki riwayat pelayanan di rumah sakit dan masih memerlukan layanan untuk kondisi tersebut, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat pasien terdaftar dapat merujuknya secara langsung ke rumah sakit.



Dartimin (63), pasien BPJS Kesehatan penderita penyakit Kusta (Lepra) melakukan pengambilan sampel jaringan saraf pada kulit untuk keperluan laboratorium di RSUP Dr.Rivai Abdullah, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (8/8/2023). Menurut data Kementerian Kesehatan RI, Indonesia masih menjadi penyumbang kasus kusta nomor 3 di dunia setelah India dan Brazil. Di tahun 2021 ada 7.146 penderita kusta baru, dengan proporsi anak sebesar 11% (data per 24 Januari 2022).

*) Pemenang Photo Story Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2023



Suasana Poliklinik Kusta di RSUP Dr.Rivai Abdullah, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (25/7/2023).Kementerian Kesehatan pada Januari 2022 menyebut ada 13.487 penderita kusta dan penemuan kasus baru pada 2021 mencapai 7.146 kasus. Sebanyak 15,4% pasien kusta mengalami kecacatan akibat keterlambatan penanganan penyakit. Secara nasional, jumlah penderita kusta di Indonesia kurang dari 1 orang tiap 10.000 penduduk. Indonesia pun menargetkan mampu mengeliminasi kusta pada 2024.



Obat Kusta (lepra) milik seorang pasien yang ditunjukkannya di RSUP Dr.Rivai Abdullah, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (26/7/2023).

BPJS KESEHATAN

BERI KERINGANAN BAGI WNI DI LUAR NEGERI HINGGA PESERTA NONAKTIF PENUNGGAK CICILAN



Pasal 6 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa "Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan".

Pasal tersebut dengan jelas mewajibkan penduduk Indonesia harus terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang saat ini dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagaimanapun kondisi yang tengah dirasakan oleh warga, semisal sedang merasa bugar sehingga tidak memerlukan jaminan kesehatan, tetap tak ada pengecualian. Selama tinggal di Indonesia, setiap penduduk akan diwajibkan terdaftar sebagai peserta JKN.

Meski demikian, ada dua kondisi

yang bisa membuat seseorang tidak lagi dikenai kewajiban menjadi peserta JKN. Kondisi pertama ialah jika yang bersangkutan tinggal di luar negeri, sedikitnya enam bulan. Mengenai hal tersebut, aturannya tercantum dalam Pasal 37 ayat 1 peraturan yang sama. Pasal tersebut menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama enam bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara.

Pemberhentian sementara dilakukan karena peserta tidak akan mendapatkan fasilitas kesehatan atau manfaat dari BPJS Kesehatan. Sebab BPJS Kesehatan tidak memberikan pelayanan untuk pengobatan yang dilakukan di rumah sakit di luar negeri. Ini berarti, BPJS Kesehatan tidak bisa dipergunakan di luar negeri.

WNI yang akan tinggal di luar negeri

harus mengajukan permohonan penghentian sementara kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebisanya mungkin, administrasi penonaktifan sementara status kepesertaan diurus sebelum keberangkatan ke luar negeri.

Pemohon dapat mengurus pengajuan penonaktifan status ini secara *online* melalui aplikasi Mobile JKN ataupun memanfaatkan layanan PANDAWA (pelayanan administrasi lewat WhatsApp) di nomor 0811 8 165 165 pada hari kerja, pukul 08.00-16.00. Pilih menu pengurangan anggota keluarga, kemudian pilih menu pelaporan WNI pergi ke luar negeri.

Ada sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan peserta untuk pengurusan administrasi ini. Dokumen tersebut ialah kartu keluarga, KTP, kartu JKN, visa (diplomantik, dinas, belajar, pertukaran pelajar, khusus pegawai



internasional, khusus bisnis) atau izin tinggal di luar negeri atau surat pemberitahuan dari penyelenggara/sponsor, dan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Bila pengurusan secara *online* menemui kendala, maka pengurusan administrasi permohonan ini juga dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Namun pastikan tetap membekali diri dengan kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

Selain menyertakan dokumen-dokumen tersebut, peserta yang ingin menonaktifkan status kepesertaannya juga harus membayarkan iuran BPJS Kesehatan sampai bulan keberangkatannya ke luar negeri. Bila peserta tinggal di luar negeri bersama keluarganya, maka iuran dibayarkan untuk seluruh anggota keluarganya.

Lalu bagaimana bila peserta terlanjur berada di luar negeri dan belum menonaktifkan status kepesertaannya? Untuk kasus seperti ini, pengurusannya tidak bisa dilakukan secara *online*, melainkan harus dengan mendatangi langsung Kantor BPJS Kesehatan.

Pengurusan ke Kantor BPJS Kesehatan pun harus dilakukan oleh anggota keluarga yang tertera dalam kartu keluarga yang sama. Anggota keluarga tersebut harus menyerahkan salinan surat izin tinggal di luar negeri dan/atau sedang melakukan pendidikan di luar negeri. Selain itu, dokumen yang juga harus dipersiapkan ialah surat keterangan pindah domisili dari desa/kelurahan setempat. Kemudian, peserta diharuskan membayar seluruh tunggakan iuran sampai dengan bulan lapor.

Penonaktifan sementara status kepesertaan tersebut hanya berlaku jika peserta tinggal di luar negeri. Namun jika sudah kembali tinggal di Tanah Air, maka kepesertaan BPJS Kesehatan harus kembali diaktifkan dengan cara melapor ke BPJS Kesehatan serta membayar iuran paling lambat satu bulan setelah

kembali serta berhak mendapat manfaat. Aturan mengenai hal ini tercantum pada Pasal 37 Ayat 4 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kondisi kedua yang memperkenankan penduduk tidak lagi wajib menjadi peserta JKN ialah jika telah meninggal dunia. Hanya saja, ada prosedur administrasi yang tetap harus diurus anggota keluarga untuk menonaktifkan status kepesertaan yang bersangkutan.

Anggota keluarga dapat mengurusnya secara *online* melalui layanan PANDAWA atau mendatangi langsung Kantor BPJS Kesehatan dengan mempersiapkan sejumlah dokumen pendukung yang diperlukan.

Jika yang meninggal dunia merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran atau Pekerja Penerima Upah, dokumen yang harus disiapkan adalah kartu identitas peserta JKN dan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa/kelurahan. Bisa juga berupa akta kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Untuk peserta mandiri, selain syarat-syarat tersebut, anggota keluarga juga harus memperlihatkan kartu

keluarga asli serta menyerahkan salinannya yang disertai juga bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat yang sudah mengurus hal ini tapi masih mendapatkan tagihan, maka kemungkinan ada tunggakan iuran yang belum lunas semasa hidup. Iuran yang tertunggak ini menjadi tanggung jawab ahli waris untuk melunasinya.

Namun mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018, pada pasal 43 disebutkan bahwa tunggakan iuran merupakan piutang BPJS Kesehatan. Hanya saja, ada keringanan yang diberikan kepada peserta yang menunggak. Keringanan tersebut berupa penghitungan maksimal tunggakan sebanyak 24 bulan. Maka jika menunggak lebih dari dua tahun pun, yang akan ditagih BPJS Kesehatan hanya sebanyak 24 bulan.

Keringanan lain yang juga ditawarkan BPJS Kesehatan kepada peserta ialah mencicil tunggakkannya dengan memanfaatkan program Rencana Pembayaran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB). Peserta yang memiliki tunggakan lebih dari empat bulan dapat membayar dengan mekanisme cicilan.

Program REHAB dikhususkan bagi peserta yang berasal dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja. Peserta dapat menetapkan periode cicilan maksimal hingga 12 tahapan.

Peserta yang berminat memanfaatkan Program REHAB ini bisa mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN. Pilihan menu REHAB terampang di halaman utama aplikasi.

Jika pengajuan Program REHAB telah selesai dan cicilan pertama tunggakan telah dibayarkan, maka selambat-lambatnya 1x24 jam, status kepesertaan akan kembali aktif dan manfaat layanan BPJS Kesehatan pun bisa kembali diakses.



Jovial da Lopez

MENGINSPIRASI GENERASI MUDA LEWAT KONTEN KREATIF DAN AKSI NYATA

Kreator konten Jovial da Lopez dikenal memiliki kepedulian besar terhadap isu-isu sosial, pendidikan, lingkungan, politik, hingga pemberdayaan komunitas. Bersama adiknya, Andovi da Lopez, Jovial tak henti-hentinya mengedukasi anak-anak muda melalui berbagai karya kreatifnya, termasuk video dan drama musikal.

Berbicara mengenai keterlibatannya dalam isu lingkungan, Jovial yang lahir pada 24 Februari 1990 ini menceritakan, pengalamannya dalam kegiatan peduli lingkungan telah dimulai sejak ia mulai aktif mengembangkan *channel* YouTube *SkinnyIndonesian24* bersama adiknya. Salah satu aksinya adalah membersihkan Pantai Seminyak dari sampah plastik.

"Dalam aktivitas ini, kita *kumpulin* beberapa anak dan melakukan pembersihan pantai. Susah banget, karena besoknya datang, lokasi yang kemarin kita *bersihin* sudah numpuk lagi sampahnya," cerita Jovial saat menjadi pembicara di acara *Mangrove for Future 2024*, Sabtu (27/7/2024).

Jovial menyadari betapa kompleksnya masalah sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berkontribusi. Gerakan membersihkan sampah terus dilakukan. Menurutnya, sebagai seorang kreator konten dengan jumlah *followers* yang besar, ia memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan hal-hal penting yang berdampak positif bagi kehidupan banyak orang.

"Dari dahulu, saya sudah sadar kalau kita punya *channel* YouTube yang besar, kita punya *followers*, kita juga harus menyuarakan hal-hal yang penting. Bukan hanya bagi kita dan finansial kita, tetapi bagi kehidupan kita semua. Makanya kita buat video itu dan berlanjut beberapa kali," kata Jovial yang merupakan lulusan Fisika

Nuklir Universitas Indonesia (UII).

Melalui berbagai konten kreatifnya, Jovial yang akrab disapa KaJo mengedukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Ia berusaha menyampaikan pesan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian bumi.

Selain itu, melalui berbagai inisiatif dan program, Jovial dan Andovi juga berusaha memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses bagi generasi muda.

Pada 2017, ketika kanal YouTube *SkinnyIndonesian24* mencapai 1 juta *subscribers*, Jovial dan Andovi memberikan beasiswa kuliah sebagai *giveaway*. Beasiswa tersebut diberikan kepada tiga mahasiswa perguruan tinggi negeri hingga lulus.

Selain itu, perbaikan infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian Jovial. Bersama *Happy Hearts Indonesia* dan *Kitabisa.com*, dia berhasil mewujudkan proyek impiannya dengan membangun kembali SMP dan SMK Cerdas Bangsa di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, Jovial menjadi Chief Creative Officer di *Narasi TV*, sebuah platform media yang terkenal dengan konten-konten inovatif dan kritis. Walaupun tidak lagi aktif di *channel* YouTube *Skinny Indonesian24*, Jovial terus mengembangkan inisiatif, program, dan gerakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah

sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Investasi Kesehatan

Jovial juga menyuarakan pandangannya tentang pentingnya berinvestasi dalam kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Menurutnya, mengeluarkan uang untuk kesehatan bukanlah sebuah kerugian. Justru manfaatnya sangat besar ketika kita harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang mahal.

BPJS Kesehatan juga memberikan pilihan kelas rawat inap dengan iuran yang beragam. Bahkan untuk golongan masyarakat tidak mampu, mereka bisa menjadi peserta Penerima Bantuan iuran (PBI).

Baginya, kesehatan adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan adanya BPJS Kesehatan, masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang lebih terjangkau, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi kesehatan nasional.

"*Health care* merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat yang sehat akan berdampak ke sebuah negara yang sehat. Ekonominya, politiknya, seluruh pergerakan sosialnya akan sehat. BPJS Kesehatan memberikan kita infrastruktur, memberikan perlindungan atas kesehatan kita," kata Jovial.



FRISTA,

LEBIH MUDAH KENALI DAN VERIFIKASI PESERTA JKN



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terus menghadirkan inovasi demi pelayanan yang lebih baik kepada para pesertanya. Dihadirkannya inovasi demi inovasi tersebut diharapkan mampu menepis anggapan tentang lamanya waktu tunggu pelayanan peserta yang selama ini kerap diidentikkan dengan BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah menghadirkan inovasi antrian *online* demi memangkas waktu pendaftaran peserta yang ingin mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Meski berhasil memotong waktu tunggu yang cukup signifikan, nyatanya BPJS Kesehatan tak lantas berpuas diri.

Inovasi terbaru pun kembali dihadirkan. Kali ini berupa *Face Recognition Integrated System* (FRISTA) yang resmi dirilis Juli 2024. Inovasi digital ini dimanfaatkan

untuk mempermudah layanan sejak tahap pendaftaran, yakni berupa teknologi pengenalan wajah yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan keakuratan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, yang hadir langsung saat perilis, mengatakan pengadopsian FRISTA dapat membuat proses verifikasi identitas peserta menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, potensi terjadinya kesalahan yang mengakibatkan panjangnya antrian dapat diminimalisir.

Face recognition merupakan teknologi autentikasi secara biometrik, yakni menggunakan karakteristik tubuh manusia, seperti sidik jari, iris, retina, wajah, dan lainnya. Sistem ini semakin sering digunakan karena dianggap lebih aman dan akurat, dengan keamanan yang lebih baik dibandingkan metode konvensional.

Secara umum, *face recognition* berfungsi memverifikasi identitas seseorang untuk dicocokkan dengan database yang sudah ada. Manakala didapati kecocokan, maka identitas tersebut bisa mengakses layanan atau aplikasi. *Face recognition* ini juga dianggap sebagai sistem identifikasi yang paling natural karena yang pertama kali dilihat dari seseorang adalah wajahnya. Wajah pula yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya.

Sistem analisis yang digunakan pada cara kerja *face recognition* ialah pendekatan dua dimensi yang *database*-nya lebih gampang dicocokkan. Pendekatan untuk metode analisisnya dilakukan dengan geometri wajah yang mengukur jarak antara bibir dan hidung, jarak antara mata kiri dan kanan, kedalaman mata, hingga jarak antara jidat dan dagu. Ada pula pendekatan metode analisis secara fotometris menggunakan warna kulit, bentuk

hidung, warna iris mata, bentuk bibir, hingga kontur wajah yang menjadi tanda khusus pada wajah sebagai patokannya.

Wajah yang telah ditangkap oleh kamera selanjutnya dianalisis dan dikonversi menjadi data agar pencocokan dapat dilakukan lebih mudah oleh sistem. Fitur-fitur wajah yang sudah dianalisis tersebut diubah menjadi data berbasis matematika yang nantinya diterjemahkan oleh *database* untuk kemudian dinilai oleh sistem apakah wajah yang terekam memiliki kesesuaian untuk dapat diambil keputusan, apakah identitas tersebut berhak mengakses layanan.

Selain dimanfaatkan untuk metode buka kunci pada telepon genggam, teknologi *face recognition* ini juga sudah banyak diaplikasikan. Misalnya saja absensi pegawai, verifikasi calon nasabah bank, dan lainnya.

Kini, BPJS Kesehatan juga mulai mengaplikasikan teknologi *face recognition* melalui FRISTA ini juga untuk alasan keakuratan, yakni layanan kesehatan memang diakses oleh peserta yang tepat, sesuai data yang tercantum dalam database kepesertaan.

Inovasi ini selaras dan mendapat dukungan penuh melalui Addendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan BPJS Kesehatan Nomor 100.4.71/7412/DUKCAPIL dan 203/KTR/0423 dalam hal nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan dengan foto wajah. Dengan addendum tersebut, FRISTA bisa memanfaatkan elemen data foto dari Dukcapil sebagai dasar validasi pada implementasi sistem *face recognition*.

"Teknologi ini memiliki potensi besar dalam memastikan, bahwa hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN. Ini juga langkah besar dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas," ucap Ghufuron.

Adanya FRISTA memungkinkan penerapan *single identity* menggunakan KTP elektronik sebagai alternatif pengganti kartu JKN dalam melakukan verifikasi dan validasi eligibilitas peserta.

"Kemudahan layanan bagi peserta JKN akan memberikan dampak yang sangat besar. FRISTA tidak hanya akan mempermudah proses verifikasi, tapi juga akan meningkatkan pengalaman peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Ini merupakan langkah konkret menuju layanan kesehatan yang lebih inklusif," ucap Ghufuron.



Sebelum diluncurkan, FRISTA sebagai langkah verifikasi peserta saat mendaftar layanan, telah diujicobakan di sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Salah satunya ialah di Rumah Sakit Hermina Pasteur Kota Bandung yang menyediakan secara khusus Anjungan Pendaftaran Mandiri di salah satu sudut rumah sakit.

Peserta BPJS Kesehatan yang akan mengakses layanan, bisa melakukan pendaftaran mandiri di anjungan tersebut, seraya dilakukan verifikasi data kepesertaannya melalui FRISTA. Rumah sakit lain yang juga menguji coba implementasi FRISTA ialah RS Advent yang sama-sama berlokasi di Kota Bandung. Petugas pendaftaran mengaku sangat terbantu dengan hadirnya FRISTA yang dapat melakukan verifikasi wajah dalam hitungan detik. Dengan begitu, proses pendaftaran pasien menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga berkorelasi pula pada percepatan

waktu pelayanan pendaftaran.

Tidak hanya petugas pendaftaran yang merasa dimudahkan dengan hadirnya FRISTA. Peserta yang diverifikasi menggunakan FRISTA juga mengakui metode ini lebih mudah, dibandingkan dengan verifikasi menggunakan sidik jari yang sering kali salah sehingga harus beberapa kali diulang.

Menurut Ghufuron, FRISTA akan diimplementasikan secara nasional pada layanan JKN, sehingga setiap peserta di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari inovasi teknologi ini.

"Kami harap, FRISTA menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan. Inovasi ini juga diharapkan dapat menginspirasi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia," ucapnya.



KOLABORASI AI DAN KREATIVITAS

MANUSIA KUNCI MASA DEPAN LEBIH BAIK



Menengok sekilas ke era 2000-an awal, temu janji di sebuah lokasi yang benar-benar asing bisa sangat berisiko gagal bersua. Selengkap apa pun alamat yang diberikan, risiko gagal sampai di lokasi tujuan tetap ada.

Hasil tanya sana-sini kepada siapa saja yang dijumpai di tengah perjalanan pun tak selalu menjadi solusi. Bervariasinya pemahaman seseorang akan petunjuk arah atau patokan jalan tertentu, membuat perjalanan menuju sebuah lokasi baru bisa menjadi sangat menantang.

Namun hal seperti itu sudah sangat jarang terjadi sekarang ini. Seasing apa pun lokasi yang akan dituju, bahkan meski terpisah jarak hingga ribuan kilometer pun, petunjuk arah menuju tempat tersebut bisa diakses dengan mudah berkat kehadiran aplikasi di telepon genggam.

Cukup dengan menginput lokasi yang dituju, aplikasi penunjuk arah itu pun dalam waktu singkat

langsung memberikan sejumlah alternatif rute yang bisa ditempuh untuk mencapainya. Tak hanya itu, masing-masing alternatif rute yang ditawarkan pun turut dilengkapi dengan estimasi waktu yang akan dihabiskan di perjalanan.

Meski kasus salah petunjuk masih kerap ditemui, tapi mayoritas masyarakat saat ini sangat bergantung pada aplikasi petunjuk arah tersebut, sehingga selalu dijadikan patokan tiap akan memulai sebuah perjalanan.

Namun meski perjalanan ke mana pun kini sudah dipermudah dengan kehadiran aplikasi petunjuk arah tersebut, kebanyakan orang justru mulai lebih nyaman melakukan banyak hal dari rumah. Termasuk untuk urusan belanja berbagai kebutuhan.

Dalam hal ini, masyarakat dewasa ini dimanjakan dengan kehadiran bermacam *market place* yang bisa dikunjungi dari dalam rumah. Tidak hanya untuk urusan makanan atau pakaian, macam-macam barang bisa

ditemukan di *market place*, baik yang menawarkan spesifikasi barang, maupun yang tampil sebagai *one stop shopping* serba ada.

Jika sebelumnya ada istilah *window shopping* saat jalan-jalan ke pusat perbelanjaan hanya untuk sekadar melihat-lihat, maka di era belanja via *market place* seperti sekarang ini ada kecenderungan menumpuk barang-barang incaran di keranjang virtual, yang entah kapan akan dieksekusi untuk dibeli.

Ajaibnya, layaknya *sales promotion* girl di mal yang seringkali gigih menawarkan produk, dalam konsep belanja via *market place* pun ada "SPG" tak kasat mata yang terus membayangi kita. "SPG tak kasat mata" itu biasanya muncul berupa *pop up* iklan saat kita berselancar di dunia maya, membuka akun media sosial, atau bahkan menyapa melalui fitur pesan.

Pop up iklan tersebut biasanya merupakan barang-barang yang sebelumnya dikumpulkan di keranjang belanja virtual pada *market*



place. Gencarnya kemunculan *pop up* iklan ini biasanya tak berhenti hingga kita terperdaya untuk kemudian melakukan *check out* barang tersebut.

Fenomena ini tentunya disikapi dengan cara pandang berbeda. Ada sebagian orang yang mungkin terbantu dengan strategi *pop up* iklan ini karena seakan diingatkan pada barang-barang yang mungkin memang perlu untuk dibeli.

Namun ada pula sebagian orang yang lantas terusik dengan hal ini hingga merasa kenyamanannya terganggu karena serasa diteror kehadiran *pop up* iklan barang yang mungkin sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Ilustrasi mengenai aplikasi petunjuk arah juga kemudahan berbelanja di *market place* sejatinya merupakan contoh kecil dari pemanfaatan *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, ada lebih banyak lagi pemanfaatan AI yang sudah mulai merasuk ke kehidupan manusia dewasa ini. Bicara mengenai AI, tentu tidak terlepas dari konsep Revolusi Industri 4.0 yang diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomatisasi dalam industri. Sistem cerdas ini digerakkan oleh data melalui teknologi *machine learning* dan AI.

Pada era Revolusi Industri 4.0 ini, pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia.

Dengan pemanfaatan yang tepat, kehadiran AI tentu bisa mendatangkan dampak positif.

Misalnya saja di skala rumah tangga, kini banyak alat rumah tangga yang sudah dioperasikan dengan konsep AI. Hal ini tentunya tidak sekadar meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga mendukung kualitas kebersamaan keluarga yang lebih baik.

Pada 'scope' yang lebih luas, konsep AI juga diterapkan dalam dunia kedokteran. Termasuk pula di Indonesia, yang beberapa waktu lalu mulai menguji coba *robotic telesurgery* sebagai teknologi mutakhir di bidang kedokteran yang merevolusi layanan operasi bedah di Tanah Air.

Telesurgery adalah metode pembedahan jarak jauh, di mana dokter bedah berada di tempat yang berbeda dengan pasien yang dioperasi, baik secara ruangan atau berbeda rumah sakit, bahkan melintasi batas geografi beda negara.

Kehadiran *robotic telesurgery*, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang memerlukan, terlebih di wilayah Indonesia yang saat ini masih kekurangan dokter ahli bedah yang mampu melakukan prosedur bedah yang kompleks.

Meski banyak hal yang menjadi dimudahkan dengan kehadiran AI, tapi jangan lupa pula dampak negatif yang bisa muncul karenanya. Misalnya saja berkurangnya pemikiran kritis, pemikiran analitis, hingga kemampuan pengambilan keputusan manakala terjadi ketergantungan berlebihan pada AI. Beberapa kemampuan manusia pun akan berkurang akibat ketergantungan pada AI. Misalnya saja kemampuan mengingat

informasi atau melakukan tugas kognitif bisa menurun karena semuanya sudah diambil alih oleh mesin pintar AI.

Otomatisasi yang dipicu oleh AI juga menyebabkan pergantian pekerjaan manusia oleh mesin, hingga menyebabkan pengangguran struktural dalam sejumlah sektor sangat memungkinkan terjadi. Utamanya pekerjaan repetitif yang dapat diotomasi bisa menyinkirkan tenaga manusia.

Pada akhirnya, pekerjaan tertentu mungkin akan terhapus, sehingga penting bagi pekerja melakukan *upskilling* demi memperkaya keilmuan dan keterampilan agar bisa tetap bersaing di dunia kerja. Selain terus mengasah keterampilan dan kemampuan diri, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan di tengah gempuran AI. Salah satunya ialah terus belajar, beradaptasi, dan inovatif.

Alih-alih menganggap kehadiran AI sebagai ancaman, akan lebih baik jika kita mulai memahami AI dan menggunakannya sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan. Sebab dengan pemanfaatan yang bijak, AI bisa meningkatkan efisiensi, menghasilkan inovasi, dan menciptakan peluang baru. Namun manusia tetap memiliki keunggulan dalam hal kreativitas, pemikiran strategi, dan kemampuan beradaptasi yang sulit ditiru AI. Maka dari itu, kolaborasi antara manusia dan AI merupakan kunci keberhasilan. Dengan sikap positif, kemauan terus belajar, dan kemampuan beradaptasi, kita bisa memanfaatkan AI dengan bijak untuk membangun masa depan yang lebih baik.



KETUA DEWAS BPJS KESEHATAN SEBUT PROGRAM PESIAR PENTING PASTIKAN KEBERLANGSUNGAN UHC KENDARI



Kendari - Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menjelaskan bahwa salah satu strategi yang dijalankan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) adalah Program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR).

Program ini melibatkan kolaborasi dengan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa upaya pencapaian cakupan JKN berjalan dengan optimal.

"Program PESIAR ini dirancang untuk memberikan solusi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menjangkau masyarakat, khususnya masyarakat desa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta Agen PESIAR, kami berharap dapat melakukan pemetaan data penduduk secara lebih akurat dan efektif," ujar Abdul Kadir pada kunjungan di Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis (25/07).

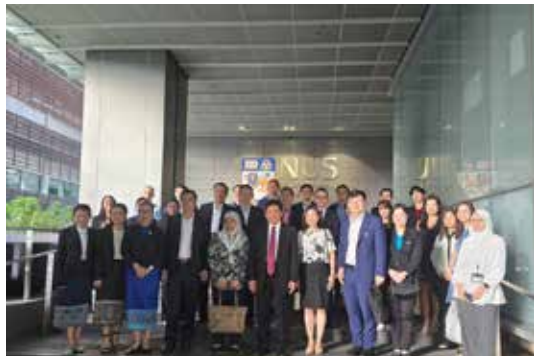
Pj. Walikota Kendari, Muhammad Yusuf, menyambut baik pemilihan Kelurahan Watu-Watu sebagai lokasi pelaksanaan Program PESIAR. Yusuf menyatakan bahwa program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di wilayahnya.

"Saya sangat mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan dalam memilih Kelurahan Watu-watu sebagai salah satu lokasi Program PESIAR. Program ini tidak hanya meningkatkan jumlah peserta JKN, tetapi juga memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, kami berharap kolaborasi ini akan terus memudahkan akses peserta ke layanan kesehatan serta informasi terkait Program JKN," ujar Yusuf.

Pada kesempatan tersebut, Agen PESIAR Kelurahan Watu-Watu, Iin Nurlan menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas pencanangan Program PESIAR di wilayahnya.

"Hal ini memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat banyak, khususnya di Kelurahan Watu-Watu. Harapannya kinerja Agen PESIAR dapat meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN," pungkasnya.

TAMPIL DI FORUM INTERNASIONAL, DIRUT BPJS KESEHATAN BEBERKAN PENTINGNYA SKRINING KESEHATAN



Singapura (13/06/2024) – Langkah promotif preventif melalui skrining kesehatan terus digalakkan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2023, terdapat 39,7 juta peserta JKN yang telah memanfaatkan layanan skrining kesehatan untuk mengetahui potensi risiko penyakit yang dimilikinya. Angka pemanfaatan skrining kesehatan tersebut melonjak 1,7 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Kala itu, skrining kesehatan baru dimanfaatkan oleh 2,24 juta peserta JKN. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menjadi delegasi tunggal Indonesia dalam acara ASEAN Priority Setting Exercise 2024 di Singapura, Kamis (14/06).

"Layanan promosi, pencegahan, skrining dan konsultasi diperkuat, sehingga bukan hanya peserta JKN yang sakit saja yang dapat memanfaatkan layanan JKN tetapi juga yang sehat dapat memanfaatkannya. Skrining riwayat kesehatan adalah langkah pertama mendeteksi risiko penyakit. Kita kelompokkan peserta JKN yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi melalui skrining riwayat kesehatan yang diakses peserta lewat Aplikasi Mobile JKN atau website BPJS Kesehatan. Kalau berisiko tinggi, akan kita arahkan ke fasilitas kesehatan supaya diperiksa dan ditangani lebih lanjut segera," jelas Ghufron di hadapan perwakilan sejumlah negara dari ASEAN.

Saat ini terdapat empat jenis layanan skrining yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN, yaitu skrining diabetes melitus, skrining hipertensi, skrining kanker serviks, dan skrining kanker payudara. Menurut Ghufron, ke depannya jenis layanan skrining yang dijamin BPJS Kesehatan akan diperluas secara bertahap hingga menjadi 14 jenis skrining. Layanan skrining tersebut di antaranya meliputi skrining talasemia, skrining anemia, skrining hepatitis, skrining tuberkulosis, skrining kanker paru, dan beberapa skrining lainnya.

Di sisi lain, beragam prestasi dan terobosan BPJS Kesehatan sepanjang menyelenggarakan Program JKN, membuat mancanegara terkesan. Selain sering diundang menjadi pembicara di berbagai negara, baru-baru ini Ghufron terpilih menjadi Co-Convener baru dari *Steering Group Joint Learning Network (JLN) for Universal Health Coverage*. Sebagai informasi, JLN merupakan suatu komunitas praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan sistem maupun sumber daya yang diharapkan mampu menjawab tantangan praktis reformasi sistem kesehatan untuk mencapai UHC.





BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KURIKULUM JAMINAN SOSIAL





TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB **BPJS SATU**

- ✓ Menindaklanjuti dan **menangani pengaduan** peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit.
- ✓ **Berkoordinasi dengan unit terkait di BPJS Kesehatan** jika pengaduan peserta tersebut berkaitan dengan unit terkait. Melakukan **koordinasi rutin** dengan petugas rumah sakit.
- ✓ Melakukan **kunjungan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan (Customer Visit)** baik yang sedang menjalani rawat jalan maupun rawat inap untuk **memastikan peserta mendapatkan pelayanan yang berkualitas** dari rumah sakit.
- ✓ Memonitor setiap hari terkait **informasi update tempat tidur dan jadwal operasi di rumah sakit**, dan memastikan informasi tersebut **benar dan bisa diakses** oleh pasien peserta BPJS Kesehatan.
- ✓ Memastikan pencatatan penanganan pengaduan melalui aplikasi Saluran Informasi Penanganan Pengaduan (SIPP) sekaligus memastikan petugas rumah sakit **dapat menggunakan dan memahami aplikasi SIPP**.
- ✓ Melakukan **Supervisi Bukti, dan Lihat Langsung (SiBLing)** di rumah sakit.